Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kedaulatan di Atas Es: Arktik dan Ambisi Negara-Negara Besar

Muhammad Yudi Abdi Amin

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Juni, 2025
Revised Juni, 2025
Accepted Juni, 2025
Available online Juni , 2025

zukhruufii@gmail.com, itokwicaksono@unmuhjember.ac.id,muhammadzefrikudus@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

Penelitian ini membahas bagaimana perubahan fisik di kawasan Arktik memicu dinamika baru dalam hubungan antarnegara. Mencairnya es membuka peluang ekonomi dan pelayaran, sekaligus mendorong militerisasi dan strategi keamanan baru dari negara-negara besar, khususnya Rusia dan anggota NATO. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori realisme, studi ini menyoroti bagaimana logika self-help dan kompetisi kekuasaan membentuk respons negara terhadap realitas baru tersebut. Meski terdapat kerja sama terbatas, dinamika kawasan didominasi oleh ketegangan strategis dan rendahnya transparansi. Keterlibatan aktor non-Arktik seperti Tiongkok turut memperkuat kompleksitas persaingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Arktik kini mencerminkan rivalitas kekuatan besar dalam tatanan global kontemporer.

Kata Kunci*:* Arktik; Dilema Keamanan; Geopolitik; Militerisasi

A B S T R A C T

This study explores how physical changes in the Arctic have triggered new dynamics in international relations. Melting ice has opened economic and navigational opportunities while driving militarization and evolving security strategies among major powers, particularly Russia and NATO members. Using a qualitative approach and framed within realist theory, the research highlights how self-help logic and power competition shape state responses to this shifting reality. Although limited cooperation exists, regional dynamics are dominated by strategic tension and low transparency. The involvement of non-Arctic actors like China further deepens the complexity. The study concludes that the Arctic now reflects great power rivalry in the contemporary global order.

Keywords*: Arctic; Security Dilemma; Geopolitics; Militarization*

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Arktik mengalami perubahan yang begitu cepat dan mendasar, baik secara fisik maupun geopolitik. Es yang mencair, jalur pelayaran baru yang terbuka, serta potensi sumber daya alam yang semakin mudah diakses telah mengubah cara negara-negara memandang kawasan ini. Arktik tidak lagi diposisikan sebagai ruang yang netral atau terisolasi dari dinamika global. Sebaliknya, ia kini muncul sebagai salah satu titik panas baru dalam peta persaingan strategis dunia.

Melihat perkembangan ini, saya merasa penting untuk memahami lebih dalam bagaimana negara-negara, terutama kekuatan besar seperti Rusia, Amerika Serikat, dan sekutu NATO-nya, menyusun strategi dan membentuk posisi mereka di kawasan tersebut. Pertanyaannya tidak hanya berkisar pada apa yang mereka lakukan, tetapi juga mengapa mereka bertindak demikian. Apa motif yang mendorong kebijakan militerisasi? Bagaimana perubahan lingkungan diterjemahkan

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

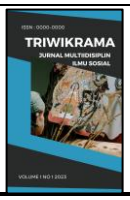

menjadi kepentingan strategis? Dan sejauh mana logika kekuasaan masih menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memberikan ruang untuk mengeksplorasi konteks, narasi, dan pertimbangan rasional para aktor negara. Pilihan ini juga didasarkan pada kerangka teori realisme, yang dalam banyak hal menawarkan cara pandang yang relevan untuk membaca perilaku negara dalam sistem internasional yang penuh ketidakpastian. Realisme, terutama dalam varian klasik dan neoklasik, membantu menjelaskan bagaimana negara mengejar kepentingan nasional, menanggapi ancaman, serta membangun posisi dalam struktur kekuasaan global.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif. Di satu sisi, saya ingin menggambarkan secara rinci bentuk-bentuk kompetisi dan strategi negara yang termanifestasi di Arktik. Di sisi lain, saya juga berusaha membuka ruang interpretasi terhadap dinamika yang terus bergerak, termasuk keterlibatan negara-negara non-Arktik seperti Tiongkok, serta bagaimana institusi regional seperti Dewan Arktik memainkan peran di tengah rivalitas kekuatan besar.

Lebih dari sekadar mengamati tindakan-tindakan di permukaan, studi ini berupaya memahami logika rasional yang ada di baliknya. Dalam kerangka realisme, negara dianggap bertindak berdasarkan prinsip self-help, di mana keamanan dan kekuasaan menjadi prioritas utama. Namun saya juga menyadari bahwa dalam kasus Arktik, situasinya tidak selalu sesederhana itu. Ada kerja sama yang terbentuk di tengah ketegangan, ada negosiasi yang berlangsung bersamaan dengan pembangunan kekuatan. Kompleksitas inilah yang mendorong saya untuk melihat Arktik bukan hanya sebagai ruang fisik yang sedang berubah, tetapi juga sebagai arena dinamis tempat logika kekuasaan dan kebutuhan praktis saling bertemu dan saling menegosiasikan batasnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Isu Arktik sebagai kawasan yang semakin strategis dalam percaturan global tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah studi telah menyoroti bagaimana kawasan ini perlahan meninggalkan citra sebagai ruang kerja sama ilmiah dan perlindungan lingkungan, dan berubah menjadi arena baru bagi kompetisi kekuatan besar.

Salah satu bacaan awal yang cukup penting datang dari tulisan Heininen (2011), yang melihat bahwa Arktik pasca-Perang Dingin bukan sepenuhnya menjadi kawasan damai. Menurutnya, meskipun terdapat semangat kolaboratif, dinamika kekuasaan tetap ada di bawah permukaan, terutama dalam bentuk kepentingan strategis negara-negara besar. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Murray dan Nuttall (2014), yang menekankan bahwa Arktik tidak bisa dipisahkan dari logika realisme, karena negara tetap menjadi aktor utama dalam menentukan arah kawasan ini.

Di sisi lain, sejumlah studi mencoba menyoroti peran institusi regional seperti Dewan Arktik. Altunkaya (2023) menunjukkan bahwa meskipun forum ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama, ruang lingkupnya terbatas dan nyaris tidak menyentuh isu pertahanan atau keamanan. Chater (2015) bahkan menyebutkan bahwa ketegangan yang terjadi belakangan ini justru menunjukkan batas-batas efektivitas institusi dalam meredam persaingan kekuasaan yang lebih besar.

Sementara itu, Finabel (2020) memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok memandang Arktik sebagai bagian dari strategi global mereka. Ia menjelaskan bahwa kehadiran militer, infrastruktur pendukung, serta penguasaan jalur laut menjadi bagian penting dari kalkulasi keamanan jangka panjang. Hal ini selaras dengan apa yang ditulis oleh Mohammed (2018), yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat mulai mengubah sikapnya terhadap Arktik, dari wilayah pinggiran menjadi bagian dari kawasan strategis yang tak bisa diabaikan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

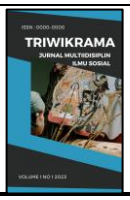

Dari keseluruhan bacaan ini, terlihat bahwa perdebatan tentang masa depan Arktik tidak lagi hanya soal lingkungan atau kerja sama ilmiah, melainkan juga menyangkut bagaimana negara-negara besar merespons perubahan lingkungan dengan strategi kekuasaan. Penelitian ini berangkat dari pandangan tersebut, dan berupaya memahami lebih jauh bagaimana dinamika kekuatan di Arktik mencerminkan pola-pola yang selama ini dikenal dalam teori hubungan internasional, khususnya realisme.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dipilih bukan hanya karena sifat data yang ingin dikaji, tetapi juga karena kebutuhan untuk memahami secara mendalam makna di balik tindakan negara-negara di kawasan Arktik. Fokus penelitian ini bukan semata pada apa yang terjadi, tetapi lebih pada bagaimana dan mengapa negara-negara tersebut mengambil langkah tertentu, terutama dalam konteks keamanan dan kepentingan strategis. Melalui pendekatan ini, saya berusaha menangkap nuansa, narasi, serta pertimbangan rasional di balik berbagai kebijakan luar negeri dan pembangunan kekuatan militer di wilayah utara dunia yang semakin strategis ini.

Dalam praktiknya, penelitian ini didasarkan pada studi pustaka dan analisis dokumen, yang mencakup laporan kebijakan, artikel jurnal akademik, strategi militer negara, serta berita dan publikasi resmi yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif. Saya mencari pola-pola tematik yang muncul dalam berbagai dokumen dan pernyataan resmi, lalu mengaitkannya dengan konsep-konsep utama dalam teori realisme seperti kepentingan nasional, keseimbangan kekuasaan, dilema keamanan, dan self-help.

Kerangka teori realisme, baik dalam bentuk klasik maupun neoklasik, menjadi panduan dalam membaca tindakan negara. Realisme klasik membantu saya memahami bagaimana persepsi dan motif individu atau elite memengaruhi kebijakan luar negeri, sementara realisme neoklasik memberikan lensa struktural yang menjelaskan posisi negara dalam sistem internasional. Perpaduan ini memungkinkan analisis yang lebih kaya dan tidak semata-mata melihat negara sebagai aktor tunggal yang rasional, tetapi juga sebagai entitas yang dibentuk oleh konteks domestik dan persepsi ancaman.

Sepanjang proses analisis, saya berusaha menjaga konsistensi antara data yang ditemukan dan interpretasi teoretis yang digunakan. Setiap temuan tidak hanya dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari narasi yang lebih besar tentang bagaimana negara-negara merespons perubahan cepat di kawasan Arktik. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan dinamika yang terjadi, tetapi juga berupaya memahami logika di balik keputusan yang diambil oleh para aktor utama.

3. PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Efektifitas Forum Dalam Program Desa Devia

Arktik selama ini dikenal sebagai wilayah dengan ketegangan politik yang rendah. Ia sering disebut sebagai zona kerja sama, tempat negara-negara saling berbagi kepentingan dalam isu lingkungan dan ilmiah. Namun, perubahan iklim global yang menyebabkan pencairan es secara drastis telah mengubah wajah kawasan ini secara perlahan tapi pasti. Akses yang dulu tertutup kini terbuka. Jalur pelayaran menjadi lebih mudah dilalui, dan sumber daya alam yang dulunya terkubur di bawah lapisan es mulai terlihat sebagai aset bernilai tinggi. Akibatnya, Arktik kini

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

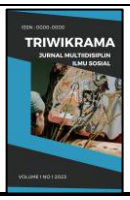

tidak lagi hanya menjadi wilayah kajian ilmiah, tetapi juga menjadi bagian dari kalkulasi strategis negara-negara besar.

Peningkatan aktivitas militer di kawasan ini muncul sebagai respons langsung terhadap perubahan tersebut. Negara-negara yang memiliki kepentingan di Arktik memperkuat posisinya dengan berbagai cara, mulai dari pembangunan pangkalan militer, latihan skala besar, hingga pengembangan teknologi khusus untuk operasi di iklim ekstrem. Dari kacamata realis, langkah-langkah ini mencerminkan prinsip self-help, di mana setiap negara bertindak secara mandiri untuk mengamankan kepentingannya dalam sistem yang tidak memiliki otoritas pusat.

Rusia menjadi aktor yang paling terlihat aktif dalam proses ini. Negara tersebut tidak hanya menghidupkan kembali pangkalan-pangkalan militer era Soviet di sepanjang pesisir utaranya, tetapi juga membangun fasilitas baru dengan perlengkapan canggih. Armada Utara Rusia terus diperkuat, dan infrastruktur militer di sepanjang Jalur Laut Utara mengalami peningkatan signifikan. Bagi Moskow, kawasan ini adalah wilayah strategis yang tidak bisa dibiarkan tanpa perlindungan langsung.

Di sisi lain, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada juga menunjukkan keseriusan mereka, meski dengan pendekatan yang sedikit lebih hati-hati. Amerika Serikat menjaga kehadirannya melalui fasilitas di Greenland dan Alaska, sementara Kanada memperluas infrastruktur militer di wilayah utara, termasuk membangun sistem radar canggih dan memperbarui kerja sama pertahanan dengan AS melalui NORAD. Negara-negara Nordik seperti Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia pun tidak tinggal diam. Mereka meningkatkan anggaran pertahanan, memperkuat kerja sama regional, dan membangun fasilitas baru yang relevan dengan kebutuhan keamanan kawasan.

Yang menarik, militerisasi ini tidak hanya terlihat dari jumlah pangkalan atau personel yang ditempatkan. Kualitas kemampuan militer juga menjadi fokus. Negara-negara tersebut mengembangkan teknologi yang mampu beroperasi dalam kondisi ekstrem Arktik, seperti sistem pengawasan jarak jauh, kendaraan militer yang tahan dingin, serta kemampuan siber yang siap mendukung operasi lintas domain. Beberapa di antaranya bahkan melakukan investasi besar dalam riset militer yang spesifik untuk lingkungan kutub.

Militerisasi Arktik telah menciptakan dinamika baru yang lebih kompleks. Setiap upaya defensif dapat dengan mudah dibaca sebagai tindakan ofensif oleh pihak lain. Inilah yang dikenal sebagai dilema keamanan. Dalam kondisi seperti ini, risiko miskalkulasi meningkat. Apa yang dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bisa dipersepsikan sebagai ancaman, dan sebaliknya. Akhirnya, kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai simbol kerja sama internasional justru berubah menjadi ruang penuh ketegangan yang diselimuti kepentingan strategis negara-negara besar.

Eskalasi di Arktik

Perkembangan militerisasi di Arktik tidak hanya terlihat dari pembangunan pangkalan atau penempatan pasukan secara fisik. Di balik itu, ada dua hal lain yang sama pentingnya, yaitu peningkatan intensitas latihan militer dan penguatan infrastruktur pendukung. Dalam konteks geopolitik yang semakin kompetitif, dua elemen ini berperan besar dalam mempertegas kehadiran negara-negara besar di kawasan yang dulu cenderung tenang ini.

Latihan militer yang dilakukan di Arktik kian sering, skalanya membesar, dan kompleksitasnya meningkat. Negara-negara anggota NATO, misalnya, menggelar latihan seperti Trident Juncture di Norwegia yang melibatkan puluhan ribu personel dari berbagai negara. Tujuannya bukan hanya menguji kesiapan operasional pasukan dalam menghadapi suhu ekstrem, tetapi juga mengirimkan pesan kekuatan kepada rival potensial. Latihan lain, seperti Arctic Specialist, lebih bersifat teknis dengan fokus pada kemampuan khusus seperti penjinakan bahan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

peledak dan operasi di lingkungan ekstrem. Dalam kegiatan ini, partisipasi datang dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Norwegia, Denmark, dan Swedia.

Di sisi lain, Rusia juga terus menunjukkan kapabilitasnya melalui latihan skala besar seperti Vostok 2018. Latihan ini menarik perhatian karena melibatkan ratusan ribu personel, dan mencerminkan semakin eratnya hubungan militer Rusia dengan Tiongkok. Kolaborasi dua kekuatan ini di kawasan utara tentu memberi sinyal yang tidak bisa diabaikan oleh negara-negara Barat. Patroli udara dan laut juga semakin intens dilakukan oleh kedua kubu. Tidak jarang, aktivitas ini menimbulkan gesekan diplomatik yang memperlihatkan betapa tingginya ketegangan di balik setiap manuver militer.

Sementara latihan militer terus berjalan, negara-negara juga aktif memperkuat infrastruktur pendukung mereka. Pelabuhan laut dalam dibangun untuk mendukung pergerakan kapal perang. Landasan pacu diperpanjang agar mampu menampung pesawat tempur dan pesawat angkut berat. Sistem pengawasan dan radar ditingkatkan agar mampu mendeteksi pergerakan lebih cepat dan lebih akurat. Rusia, misalnya, memperkuat infrastruktur militer di sepanjang Jalur Laut Utara untuk mendukung Armada Utaranya. Kanada pun tidak tertinggal. Peningkatan fasilitas bandara di Inuvik, pembangunan pusat operasional di Iqaluit dan Yellowknife, serta proyek radar Over-the-Horizon bersama Australia menjadi bagian dari respons strategisnya.

Proyek radar ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Ia dirancang untuk mendeteksi ancaman dari jarak jauh, terutama dari wilayah utara yang luas dan sulit diawasi. Dengan sistem ini, Kanada memperkuat posisi pertahanannya dan secara langsung mendukung struktur keamanan bersama seperti NORAD. Negara-negara lain di kawasan Arktik juga melakukan langkah serupa, meskipun skalanya berbeda-beda.

Kondisi ini menunjukkan bahwa militerisasi Arktik berkembang tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kecanggihan. Setiap negara berusaha meningkatkan keunggulan teknologinya untuk memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam kompetisi ini. Namun, semakin banyak langkah pertahanan yang diambil, semakin besar pula kemungkinan kesalahpahaman. Dalam teori hubungan internasional, kondisi seperti ini disebut dilema keamanan. Ketika satu pihak mencoba melindungi dirinya, pihak lain bisa melihatnya sebagai ancaman. Maka, tindakan yang awalnya bersifat defensif bisa memicu respons agresif.

Situasi semacam ini menjadikan Arktik sebagai kawasan dengan potensi eskalasi yang tinggi. Dengan tidak adanya otoritas pusat di sistem internasional, dan dengan semua negara bertindak atas nama kepentingannya masing-masing, peluang untuk salah langkah akan selalu ada. Dalam lanskap yang seperti itu, latihan militer dan pembangunan infrastruktur, seberapa pun rasional maksudnya, tetap menyimpan risiko yang tidak bisa diabaikan.

Dinamika Kekuatan di Arktik: Modernisasi Rusia dan Respons NATO

Dinamika keamanan di kawasan Arktik saat ini tidak dapat dilepaskan dari modernisasi militer Rusia yang begitu ambisius. Di sisi lain, NATO dan negara-negara anggotanya pun mulai menunjukkan respons, meski belum sekompak yang dibayangkan. Dalam kaca mata realisme, apa yang terjadi ini bukanlah hal yang mengejutkan. Negara-negara bertindak untuk menjaga atau memperkuat posisi strategisnya ketika lanskap kekuatan sedang berubah. Arktik yang dulu dianggap tenang, kini menjadi wilayah penting dalam kalkulasi pertahanan dan kepentingan nasional.

Rusia secara konsisten menempatkan Arktik sebagai bagian vital dari strategi globalnya. Bagi Moskow, wilayah ini bukan hanya ladang sumber daya masa depan, tetapi juga ruang yang harus dijaga secara ketat. Dalam berbagai dokumen resmi, Arktik disebut sebagai zona kepentingan strategis yang harus dilindungi dari pengaruh eksternal. Pandangan ini kemudian

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

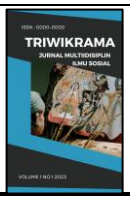

diwujudkan melalui program modernisasi militer yang menyentuh hampir semua aspek pertahanan.

Armada Utara Rusia, yang berbasis di Semenanjung Kola, menjadi ujung tombak dalam strategi proyeksi kekuatan di kawasan kutub. Rusia terus memperkenalkan kapal selam nuklir generasi baru, mengembangkan kapal permukaan untuk operasi laut es, serta memperluas armada pemecah es bertenaga nuklir yang mereka miliki. Hingga kini, Rusia tercatat memiliki lebih dari enam puluh unit pemecah es, menjadikannya negara dengan kemampuan operasional sepanjang tahun yang paling unggul di wilayah Arktik.

Modernisasi ini juga mencakup sistem senjata dan infrastruktur pendukung. Rusia berinvestasi dalam senjata yang dirancang khusus untuk beroperasi di kondisi ekstrem, seperti rudal jelajah yang mampu bermanuver di suhu rendah dan sistem pertahanan udara yang disesuaikan untuk area bersalju. Jaringan pangkalan juga diperluas dan diperkuat, dari Franz Josef Land hingga Novaya Zemlya. Kapal selam Rusia bahkan terus melatih kemampuan operasi di bawah es, sesuatu yang memberi keuntungan strategis besar karena memungkinkan operasi tersembunyi yang sulit terdeteksi.

Semua langkah ini mencerminkan strategi yang dalam teori militer dikenal sebagai anti-access atau area denial. Tujuannya adalah untuk membatasi ruang gerak kekuatan asing di wilayah yang dianggap sebagai zona pengaruh. Dengan memperlihatkan kapabilitas militer yang tinggi, Rusia ingin mengirimkan pesan jelas bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika kepentingan strategisnya terganggu.

Di sisi lain, NATO sebenarnya tidak tinggal diam, walaupun respons mereka terlihat tidak sekuat atau seterorganisir Rusia. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya strategi terpadu tentang Arktik yang disepakati bersama oleh semua anggota. Sebagian negara masih melihat kawasan ini sebagai periferal dari kepentingan strategis mereka, sehingga inisiatif sering kali muncul secara terpisah dan tidak terkoordinasi penuh.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas NATO di kawasan utara mulai meningkat. Patroli udara dan laut menjadi lebih sering, terutama di wilayah strategis seperti celah antara Greenland, Islandia, dan Inggris. Latihan militer gabungan seperti Trident Juncture dan Arctic Specialist terus dilakukan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan interoperabilitas antar pasukan. Amerika Serikat bahkan telah mengaktifkan kembali Armada Kedua yang bertanggung jawab atas operasi di Atlantik Utara dan Arktik, sebagai bentuk respons langsung terhadap manuver Rusia.

Masing-masing negara anggota NATO juga memiliki pendekatan tersendiri. Amerika Serikat kini menaruh perhatian lebih serius terhadap Arktik. Mereka merilis strategi nasional baru dan berencana memperkuat armada pemecah es yang selama ini tertinggal jauh dari Rusia. Kanada pun memperkuat posisinya, baik melalui modernisasi NORAD bersama AS, maupun melalui proyek radar bersama Australia yang ditujukan untuk meningkatkan sistem pengawasan dan deteksi dini di utara.

Norwegia mengambil langkah progresif dengan memperkuat armada laut dan udaranya, serta meningkatkan kehadiran militer di wilayah utara. Denmark, melalui Greenland, juga memperkuat fasilitas pertahanan yang mereka miliki. Negara-negara ini, meskipun berbeda dalam ukuran dan kapasitas, memiliki kepentingan langsung dalam menjaga stabilitas kawasan.

Meski begitu, masih ada jarak antara niat dan koordinasi nyata. Kesenjangan strategi dan perbedaan persepsi ancaman membuat respons NATO terkesan terpecah. Jika situasi terus berkembang tanpa kejelasan strategi bersama, risiko miskalkulasi akan semakin tinggi. Bukan tidak mungkin bahwa kekosongan koordinasi ini justru dimanfaatkan oleh Rusia untuk memperkuat pengaruhnya lebih jauh.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

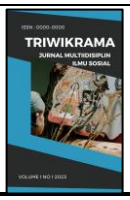

Arktik saat ini ibarat papan catur baru. Pihak-pihak yang bergerak di atasnya membawa kepentingan besar yang dibalut dengan narasi keamanan. Modernisasi senjata, latihan militer, dan penguatan pangkalan bukan lagi hal yang bersifat simbolik, melainkan nyata dan strategis. Dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi, tindakan setiap negara, seberapa pun rasionalnya, tetap memiliki konsekuensi terhadap yang lain.

Ketegangan yang Memuncak dan Risiko Eskalasi di Arktik

Semakin padatnya kehadiran militer di kawasan Arktik menciptakan lingkungan keamanan yang jauh dari stabil. Ketegangan antarnegara kini bukan lagi hal yang bersifat potensial, tetapi sudah tampak nyata dalam berbagai bentuk. Di tengah sistem internasional yang tanpa otoritas tertinggi, seperti yang dijelaskan dalam teori realisme, setiap langkah yang diambil negara untuk meningkatkan keamanannya bisa dipandang sebagai ancaman oleh pihak lain. Inilah awal dari siklus yang sulit dihentikan.

Salah satu sumber ketegangan yang paling mencolok adalah klaim wilayah yang tumpang tindih. Rusia, Kanada, dan Denmark adalah tiga di antara negara-negara Arktik yang telah mengajukan klaim terhadap bagian dasar laut di sekitar punggungan Lomonosov. Semuanya menggunakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) sebagai dasar, tetapi interpretasi dan kepentingan mereka saling berbenturan. Perebutan ini bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga tentang hak eksplorasi atas sumber daya alam yang semakin mudah dijangkau seiring mencairnya es.

Konflik tidak berhenti pada batas dasar laut. Status hukum jalur pelayaran seperti Jalur Laut Utara (NSR) dan Jalur Barat Laut (NWP) juga menimbulkan perselisihan. Rusia memandang NSR sebagai perairan internalnya dan mengatur navigasi di sana secara ketat. Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutunya menganggap jalur tersebut sebagai perairan internasional yang harus terbuka untuk pelayaran bebas. Sikap serupa juga muncul terkait klaim Kanada atas NWP. Perdebatan ini tidak sekadar tentang prinsip hukum laut, tetapi mencerminkan keinginan masing-masing negara untuk mengontrol akses strategis dan ekonomi yang sangat bernilai.

Ketegangan ini semakin rumit dengan kehadiran Tiongkok yang mulai aktif menunjukkan minat terhadap Arktik. Meskipun bukan negara Arktik secara geografis, Tiongkok menyebut dirinya sebagai “negara dekat Arktik” dan meluncurkan inisiatif Jalur Sutra Kutub. Mereka berinvestasi besar dalam riset, infrastruktur, dan proyek logistik, sering kali melalui kerja sama dengan Rusia. Namun, aktivitas ini menimbulkan kecurigaan di kalangan negara Barat. Beberapa proyek penelitian bahkan dianggap memiliki potensi penggunaan ganda, di mana teknologi sipil bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan militer. Misalnya, rencana pemasangan sensor bawah air yang disebut sebagai bagian dari riset ilmiah pernah dituduh sebagai cara tersembunyi untuk memantau pergerakan kapal selam.

Insiden-insiden seperti upaya Tiongkok membeli bandara di Finlandia, yang kemudian dibatalkan karena alasan keamanan nasional, menunjukkan bahwa kekhawatiran ini tidak hanya bersifat spekulatif. Masuknya aktor non-Arktik ke dalam percaturan kawasan menambah lapisan baru dalam dinamika keamanan yang sudah kompleks. Ketika semakin banyak kepentingan tumpang tindih, risiko kesalahpahaman dan reaksi berlebihan menjadi lebih tinggi.

Semua dinamika ini bermuara pada apa yang disebut sebagai dilema keamanan. Ketika satu negara memperkuat diri untuk menjaga keamanannya, negara lain justru merasa terancam dan merespons dengan langkah serupa. Dalam konteks Arktik, di mana komunikasi terbatas dan kondisi operasional sangat ekstrem, risiko salah persepsi meningkat. Suatu patroli rutin bisa disalahartikan sebagai ancaman langsung, dan sebuah insiden kecil bisa berkembang menjadi krisis yang sulit dikendalikan.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9 No 7, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

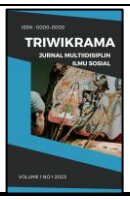

Paradoks Kerja Sama di Tengah Persaingan

Menariknya, di tengah situasi yang tegang, masih ada ruang-ruang kecil tempat kerja sama tetap berlangsung. Salah satu yang paling menonjol adalah di bidang pencarian dan penyelamatan (SAR). Kesadaran akan risiko tinggi di lingkungan Arktik yang keras membuat negara-negara di kawasan ini sepakat bahwa kerja sama adalah kebutuhan praktis yang tak terhindarkan. Perjanjian kerja sama SAR yang ditandatangani pada tahun 2011 menjadi bukti bahwa kepentingan bersama dapat melampaui batas politik, setidaknya dalam isu-isu yang berkaitan langsung dengan keselamatan manusia.

Selain itu, forum-forum seperti Arctic Coast Guard Forum memungkinkan para penjaga pantai dari berbagai negara untuk berbagi informasi dan praktik terbaik. Kerja sama teknis ini mencakup pertukaran data cuaca, koordinasi navigasi, dan pelatihan untuk menghadapi situasi darurat. Standar internasional seperti IMO Polar Code juga menunjukkan bahwa meskipun rivalitas tetap ada, negara-negara Arktik bersedia menjaga standar keselamatan minimum bagi kapal yang beroperasi di wilayah ini.

Namun, dalam pandangan realis, kerja sama semacam ini tidak bisa dilihat sebagai pertanda meredanya ketegangan. Justru sebaliknya, kerja sama ini sangat terbatas pada isu-isu non-sensitif dan bersifat pragmatis. Begitu masuk ke ranah yang menyentuh kedaulatan, yurisdiksi, atau kepentingan ekonomi strategis, kerja sama cenderung berhenti. Isu-isu seperti penegakan hukum maritim atau pengelolaan sumber daya laut sering kali ditarik ke dalam konteks geopolitik. Rusia, misalnya, menggunakan argumen perlindungan lingkungan sebagai dasar hukum untuk membatasi akses kapal asing ke Jalur Laut Utara.

Ketegangan politik global pun dengan mudah menyusup ke dalam forum-forum regional. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, beberapa negara Barat menangguhkan partisipasinya dalam Dewan Arktik. Keputusan ini menunjukkan bahwa bahkan institusi multilateral yang sebelumnya cukup stabil pun rentan terhadap gejolak geopolitik yang lebih luas. Rasa saling percaya, yang menjadi fondasi utama kerja sama regional, semakin terkikis.

Dengan demikian, meskipun kerja sama di bidang tertentu tetap berlangsung, arus utama yang mendefinisikan Arktik saat ini masih bersifat kompetitif. Rivalitas kekuatan besar tidak hanya hadir, tetapi juga semakin dalam. Di balik perjanjian SAR dan forum penjaga pantai, logika kekuasaan dan pertahanan tetap berjalan. Arktik tidak bisa lagi dibaca hanya sebagai kawasan terpencil yang netral. Ia telah menjadi salah satu cermin paling jujur dari dunia yang sedang bergeser menuju ketegangan multipolar.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Selama menyusun penelitian ini, saya melihat dengan jelas bahwa Arktik tidak lagi hanya dipahami sebagai kawasan sunyi di ujung dunia. Kini, wilayah tersebut berubah menjadi titik temu berbagai kepentingan negara, baik yang berada di lingkar Arktik maupun yang berasal dari luar. Pencairan es yang membuka akses terhadap sumber daya alam dan jalur pelayaran baru secara langsung mengubah cara pandang negara-negara besar terhadap kawasan ini. Dari semula sekadar wilayah beku yang jauh dari persaingan global, Arktik kini menjadi ruang strategis yang diperhitungkan secara serius.

Respons dari aktor-aktor utama seperti Rusia dan NATO menggambarkan bagaimana logika pertahanan dan keamanan masih sangat dominan dalam cara negara bertindak. Upaya membangun pangkalan militer, meningkatkan latihan berskala besar, hingga modernisasi teknologi pertahanan menjadi cerminan dari strategi yang dibentuk oleh rasa waspada dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi dalam sistem internasional yang tidak mengenal otoritas

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 9, Number 7 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

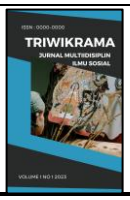

pusat. Dari sudut pandang teori realisme, langkah-langkah ini sangat bisa dipahami. Negara bertindak secara rasional untuk menjaga dirinya, namun pada saat yang sama justru memicu kecemasan dari pihak lain.

Sepanjang penelitian ini, saya juga menemukan bahwa kerja sama antarnegara memang masih mungkin terjadi. Di bidang seperti pencarian dan penyelamatan atau pengaturan pelayaran, negara-negara Arktik tetap menjalin koordinasi. Namun kerja sama ini bersifat terbatas, dan seringkali hanya berlangsung sejauh kepentingan praktis mereka bertemu. Begitu menyentuh isu-isu sensitif seperti kedaulatan atau yurisdiksi, kerja sama tersebut cenderung memudar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komunikasi antarnegara tetap berlangsung, rasa saling percaya belum tumbuh secara mendalam.

Yang menarik, keterlibatan negara seperti Tiongkok memperluas dimensi geopolitik Arktik. Tiongkok tidak punya wilayah Arktik, tetapi hadir dengan cara yang sangat strategis, mulai dari investasi, ekspedisi ilmiah, hingga infrastruktur. Bagi banyak negara Barat, kehadiran Tiongkok bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga mengundang kekhawatiran akan kemungkinan implikasi militer atau pengaruh jangka panjang di kawasan yang selama ini relatif tertutup.

Melalui keseluruhan proses ini, saya menyimpulkan bahwa realisme tetap menjadi lensa yang paling kuat untuk memahami apa yang sedang terjadi di Arktik. Negara-negara bertindak berdasarkan kepentingan, perhitungan kekuatan, dan dorongan untuk bertahan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Meski ada ruang untuk kerja sama, arus utama di kawasan ini tetap dipengaruhi oleh logika kekuasaan dan kalkulasi strategis. Dalam banyak hal, Arktik kini mencerminkan dinamika global itu sendiri: kompetitif, penuh kehati-hatian, dan selalu dalam keseimbangan yang rapuh.

Saran

a. Bagi negara-negara Arktik, penting untuk menyeimbangkan kepentingan strategis dengan tanggung jawab ekologis. Penambahan kekuatan militer perlu diimbangi dengan upaya membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas kawasan.

b. Untuk organisasi regional seperti Dewan Arktik, perlu adanya perluasan ruang dialog, termasuk membuka jalur komunikasi informal untuk isu-isu sensitif seperti keamanan dan yurisdiksi.

c. Bagi komunitas internasional, keterlibatan dalam menjaga keterbukaan jalur pelayaran dan menghormati prinsip hukum laut harus menjadi prioritas, agar Arktik tidak dikuasai secara sepihak oleh kekuatan besar.

d. Untuk pengembangan studi selanjutnya, disarankan mengkaji dimensi sosial dan hukum dari militerisasi Arktik, termasuk dampaknya terhadap masyarakat lokal dan implikasi terhadap tata kelola global.

5. DAFTAR PUSTAKA

Altunkaya, E. (2023). The evolution of the Arctic council. Middle East Technical University.

Chater, A. (2015). Explaining the evolution of the Arctic council.

Finabel. (2020). Great power competition in the Arctic.

Heininen, L. (2011). The end of the post-Cold War in the Arctic. Nordia Geographical Publications. 40 (4), 31-42

Mohammed, I. (2018). The evolving dynamics of U.S. grand strategy in the Arctic. Memorial University Research Repository.

*Corresponding author
E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com

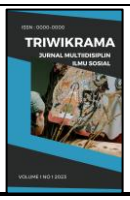

Murray, R. W., & Nuttall, A. D. (2014). International relations and the Arctic: Understanding policy and governance. Cambria Press.

Soncini, C. (2022). Liberal values or realist interests? An analysis of the shifting security narratives in the Arctic region. University of Pretoria.